

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT  
TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN KARTU HALO BEKAS PT T  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Angeline Thalita

Jurusan/Program: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing: Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

Dr. Sylvia Janisriwati, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pihak PT T dan Bank bertanggung gugat atas tindakan penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak lain dengan kartu Halo bekas PT T berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen pengguna jasa telekomunikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yudiris normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang kartu kredit dan pengguna jasa telekomunikasi belum seutuhnya diterapkan oleh Pihak PT T maupun Bank menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pihak PT T bertanggung gugat atas tindakan daur ulang kartu Halo bekas PT T karena melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Sehubungan dengan hal itu pengguna dapat melakukan upaya berupa pengajuan tuntutan ganti rugi kepada Pihak PT T. Pihak PT T melakukan upaya untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan menyediakan informasi yang benar, lengkap dan jelas berkaitan dengan produk yang diperdagangkannya baik secara lisan maupun tertulis, sedangkan Bank melakukan upaya untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit serta memberikan pemahaman terhadap konsumen mengenai produk serta hak dan kewajiban konsumen. Diperlukan pula adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi agar mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan penyalahgunaan data pribadi seperti nomor telepon seluler, akun perbankan dan lain sebagainya.

**Kata kunci:** Perlindungan konsumen, Perlindungan data pribadi, Jasa telekomunikasi, Kartu Kredit

LEGAL PROTECTION FOR CREDIT CARD HOLDERS RELATED TO THE  
USE OF USED HALO CARDS BY PT T REVIEWED FROM ACT NUMBER 8  
OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION AND ACT NUMBER  
36 OF 1999 CONCERNING TELECOMMUNICATIONS

Angeline Thalita  
Departement/Study Program: Law/Legal Studies  
Contributor: Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.  
Dr. Sylvia Janisriwati, S.H.,M.Hum.

ABSTRACT

*This research aims to determine the extent to which PT T and the Bank are accountable for the misuse of credit cards by other parties from used Halo PT T cards related to the protection of personal data of consumers of telecommunications service users. The method used in this research is normative judicial method, which is legal research conducted by examining references or secondary data as a basis for research, using 2 (two) problem approaches which are the statute approach and conceptual approach. The results of this research indicate that legal protection for consumers as credit card holders and telecommunications service users has not been fully applied by PT T nor the Bank according to Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Act Number 36 of 1999 concerning Telecommunications. PT T is responsible for recycling the used Halo PT T card because it violates the provisions of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Act Number 36 of 1999 concerning Telecommunications as well as causing loss to its users. In connection with this, the user can file a compensation claims to PT T. PT T makes effort to have good faith in running its business and to provide true, complete and clear informations about the products it sells, both verbally and written. Whereas the Bank makes efforts to enhance security in transaction with credit cards as well as providing comprehension to consumers regarding products and consumer rights and obligations. There is also a need for legislation concerning the protection of personal data in order to prevent activities involving misuse of personal data such as cell phone numbers, banking accounts and so on.*

**Keywords:** *Consumer protection, Personal data protection, Telecommunications services, Credit cards*